



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 44

NOMOR 2, DESEMBER 2018

DAFTAR ISI

TARA MITI TOMI NUKU: MERAWAT TOLERANSI DALAM TRADISI DI ALOR,
NUSA TENGGARA TIMUR

Katubi 1-16

ETHICAL CULTURE STRENGTHENING MODEL AT RESORT POLICE AS PART OF
POLICE REFORM: A BOURDIEU'S HABITUS BASED APPROACH

Ahrie Sonta 17-35

WARISAN KOLONIAL DAN MARGINALISASI ORANG LOLODA DI PANTAI BARAT
HALMAHERA

Abd. Rahman 36-47

SENI UNTUK DAMAI: UPAYA REKONSILIASI AKAR RUMPUT PASCA TRAGEDI 1965

Ganesh Cintika Putri 48-59

LAPISAN MARGINALISASI DAN KONSTRUKSI ILEGALITAS DALAM MASYARAKAT
PERBATASAN DI PERBATASAN INDONESIA FILIPINA

Dhimas Langgeng Gumelar, Natasha Devanand Dhanwani 60-75

BERDAMPINGAN DENGAN LELUHUR DI MASA DEPAN: HISTORISITAS, LANSKAP,
DAN ARTIKULASI IDENTITAS MASYARAKAT TENGER SENDURO

Nabilla Nailur Rohmah 76-87

RITUAL **BEDEKEH** SUKU AKIT DI PULAU RUPAT KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU
PADA ERA GLOBAL

Suroyo 88-97

TINJAUAN BUKU
EKOLOGI MANUSIA DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Puji Hastuti 98-102

TINJAUAN BUKU
MELIHAT PERKEMBANGAN SAINS DI INDONESIA, REVIEW BUKU *STS DI INDONESIA
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASINYA: QUO VADIS?*

Muhammad Luthf 103-118



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 44

NOMOR 2, DESEMBER 2019

DAFTAR ISI

TARA MITI TOMI NUKU: MERAWAT TOLERANSI DALAM TRADISI DI ALOR, NUSA TENGGARA TIMUR	
Katubi	1-16
ETHICAL CULTURE STRENGTHENING MODEL AT RESORT POLICE AS PART OF POLICE REFORM: A BOURDIEU'S HABITUS BASED APPROACH	
Ahrie Sonta	17-35
WARISAN KOLONIAL DAN MARGINALISASI ORANG LOLODA DI PANTAI BARAT HALMAHERA	
Abd. Rahman	36-47
SENI UNTUK DAMAI: UPAYA REKONSILIASI AKAR RUMPUT PASCA TRAGEDI 1965	
Ganesh Cintika Putri	48-59
LAPISAN MARGINALISASI DAN KONSTRUKSI ILEGALITAS DALAM MASYARAKAT PERBATASAN DI PERBATASAN INDONESIA FILIPINA	
Dhimas Langgeng Gumelar, Natasha Devanand Dhanwani.....	60-75
BERDAMPINGAN DENGAN LELUHUR DI MASA DEPAN: HISTORISITAS, LANSKAP, DAN ARTIKULASI IDENTITAS MASYARAKAT TENGER SENDURO	
Nabilla Nailur Rohmah	76-87
RITUAL BEDEKEH SUKU AKIT DI PULAU RUPAT KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU PADA ERA GLOBAL	
Suroyo	88-97
TINJAUAN BUKU EKOLOGI MANUSIA DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	
Puji Hastuti	98-102
TINJAUAN BUKU MELIHAT PERKEMBANGAN SAINS DI INDONESIA, REVIEW BUKU <i>STS DI INDONESIA KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASINYA: QUO VADIS?</i>	
Muhammad Luthfi.....	103-118



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 44

NOMOR 2, DESEMBER 2019

DDC:

Katubi

TARA MITI TOMI NUKU: MERAWAT TOLERANSI DALAM TRADISI DI ALOR, NUSA TENGGARA TIMUR

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 1–16

ABSTRAK

Meningkatnya intoleransi beragama di Indonesia akhir-akhir ini menjadi masalah serius dalam konstruksi kehidupan multikultural. Akan tetapi, ada beberapa wilayah di Indonesia yang dianggap berhasil dalam menjaga toleransi, misalnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Alor-Pantar. Bahkan, ketika konflik dahsyat dengan isu agama melanda sebagian wilayah Indonesia bagian timur pasca-runtuhnya Orde Baru, solidaritas komunitas lokal orang Alor-Pantar mampu membuat mereka terhindar dari konflik dahsyat tersebut. Hal itu karena sejak dulu orang-orang di tiap kampung di Pulau Alor-Pantar mengembangkan cara untuk menghindari konflik, termasuk konflik yang berasal dari agama, berbasis tradisi. Oleh karena itu, kehidupan beragama masyarakat di Kepulauan Alor-Pantar dan hubungannya dengan adat banyak mengundang minat para akademisi untuk membahasnya. Berbeda dengan berbagai tulisan para akademisi sebelumnya, tulisan ini membahas tradisi komunitas Muslim dan Kristen di Alor dalam menata kehidupan mereka bersama melalui nilai kebudayaan dengan memberikan penghormatan khusus pada tradisi lokal, yakni semboyan Tara miti Tomi nuku, yang artinya 'berbeda-beda tetapi satu bersaudara.' Untuk membahas persoalan itu, tradisi lisan lego-lego menjadi titik tekan pembahasan. Tulisan ini berdasar penelitian lapangan dengan metode etnografi. Berdasar analisis pelaksanaan tradisi lisan lego-lego dan lirik lego-lego, tulisan ini memaparkan dua hal, yaitu 1) praktik sosial-budaya yang telah dilakukan antarkelompok beragama yang berbeda dalam menjaga toleransi, 2) cara berbagai kelompok etnis di Alor mengajarkan pentingnya saling menghargai antarumat beragama melalui tradisi lisan lego-lego, terutama melalui lirik lagunya.

Kata kunci: toleransi beragama, tara miti tomi nuku, lego-lego, tradisi lisan, Alor, multikulturalisme

DDC:

Ahrie Sonta

ETHICAL CULTURE STRENGTHENING MODEL AT RESORT POLICE AS PART OF POLICE REFORM: A BOURDIEU'S HABITUS BASED APPROACH

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 17–35

ABSTRACT

This research emerged from concerns over cultural reform within the Indonesian Police, which has yet to show expected results, compared to successfully materialized structural and instrumental changes within the frame of Police Reform in the past two decades. Ethical culture, in this research, is believed as 'organizational capital' that is needed by the Police to facilitate cultural change. Inquiry into police habitus at the Sidoarjo Resort Police as this research's object, revealed some problems hindering institutional integrity, i.e.: reminders of paramilitary culture, police doxa as crime-fighter, insufficient and partial development of internal oversight system, absence of public participatory ethical infrastructure, and deontologic or rule-based definition of ethical approach. In

the time being, on personnel integrity aspect, there found the following problems: limited comprehension of ethics as a philosophy and of public ethics as public official's code of conduct, absence of training on ethics in police education, absence of supporting symbolic capitals, and weaknesses within recruitment and socialization system for newly recruited officers. A model of ethical culture strengthening is thus developed to overcome the problems on institutional and personnel integrity, particularly at the resort level police organization.

Keywords: Public Ethics, Ethical Culture, Sidoarjo City Resort Police, Structure-Agent

DDC:

Abd. Rahman

WARISAN KOLONIAL DAN MARGINALISASI ORANG LOLODA DI PANTAI BARAT HALMAHERA

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 36–47

ABSTRAK

Paper ini bertujuan membahas secara singkat mengenai situasi keterpinggiran Loloda di Pesisir Pantai Barat Halmahera dalam segala sektor pembangunan dibandingkan daerah-daerah lainnya di Maluku Utara. Berbicara mengenai Maluku Utara, tidaklah lengkap apabila tidak membicarakan Loloda, sebagai bagian integral dari dunia Maluku. Informasi sezaman menyatakan bahwa Loloda merupakan bekas kerajaan tertua Maluku (Moloku Loloda) di pesisir pantai barat laut Halmahera, Kawasan Laut dan Kepulauan Maluku. Loloda merupakan bagian utama dari sejarah dan kebudayaan “dunia Maluku” sejak berdirinya pada abad ke-13 Masehi. Upaya mempertahankan dan melestarikan adat dan tradisi Kerajaan Loloda terus berlangsung hingga kini, meskipun sejak periode orde lama (1950–1969) seluruh daerah di Indonesia yang dahulunya berbasis kerajaan atau Kesultanan telah dihapuskan. Daerah-daerah itu diintegrasikan ke dalam nomenklatur sistem administrasi pemerintahan daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengintegrasian itu merupakan restrukturisasi Pemerintahan Republik Indonesia ke dalam bentuknya yang baru dan resmi, selama lebih dari dua dekade masa kemerdekaan Indonesia. Pertanyaannya adalah apakah masih ada kekuatan hegemonik Ternate sebagai Warisan Kolonial Hindia Belanda atas Loloda, sehingga daerah bekas kerajaan Maluku tertua ini masih terpinggirkan dari pembangunan daerah dan nasional? Penulisan ini menggunakan metode dan metodologi sejarah, melalui studi-studi kepustakaan, karsipan, dan pengamatan di lapangan, serta wawancara lisan dengan informan-informan terpilih.

Kata Kunci: *Loloda, Halmahera, Warisan, Kolonial, Marginalisasi.*

DDC:

Ganesh Cintika Putri

SENI UNTUK DAMAI: UPAYA REKONSILIASI AKAR RUMPUT PASCA TRAGEDI 1965

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 48–59

ABSTRAK

Pembunuhan massal dan penghilangan paksa yang terjadi pasca tragedi 1965 menyisakan konflik berkepanjangan hingga kini. Narasi sejarah yang dibentuk pemerintah menempatkan sekelompok orang yang diduga berkaitan dengan PKI mengalami stigmatisasi dan ketidakadilan hingga 40 tahun setelahnya. Tulisan ini bermaksud menganalisis strategi yang dilakukan masyarakat akar rumput untuk menciptakan narasi alternatif sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi. Secara khusus, tulisan ini akan menganalisis narasi sejarah alternatif yang disuguhkan lewat pementasan teater Gejolak Makam Keramat pada 13 Juli 2017 di Yogyakarta. Pementasan ini dipilih karena proses pembuatan naskah, latihan, pemilihan metode bertutur, serta pelibatan penonton yang mampu menarasikan sejarah alternatif di tengah narasi dominan yang menghambat upaya rekonsiliasi. Tulisan ini ingin mengatakan bahwa Teater Gejolak Makam Keramat memberikan ruang bagi narasi sejarah alternatif sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi akar rumput. Paling tidak terdapat tiga strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu: pengemasan narasi alternatif dalam objek seni yang lebih aman dari persepsi; partisipasi penyintas sebagai subjek dari narasi, serta; pelibatan audience dalam proses penyajian narasi.

Kata kunci: *seni, teater, rekonsiliasi, narasi alternatif*

DDC:

Dhimas Langgeng Gumelar, Natasha Devanand Dhanwani

**LAPISAN MARGINALISASI DAN KONSTRUKSI ILEGALITAS DALAM
MASYARAKAT PERBATASAN DI PERBATASAN INDONESIA FILIPINA**

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 60–75

ABSTRAK

Studi marginal mendekatkan fokus kajian sering pada identitas suatu komunitas tempatan, tanpa di sadari, pandangan tersebut mengkonstruksi dimensi marginal yang anakronistik. Studi tersebut menjerumuskan masyarakat di perbatasan Indonesia-Filipina, dan memunculkan romantisme. Studi yang dilakukan di Kepulauan Sangihe, berdasar pada fakta-fakta etnografis dan historis, serta observasi yang dilakukan selama bulan Juli-Agustus 2018. Kami menggunakan hubungan relasional untuk menangkap plot transformasi pada catatan Eropa serta kajian historis yang sudah diterbitkan. Hubungan tersebut pada dasarnya mendeskripsikan kelompok pejuang yaitu buruh paksa yang dijadikan budak. Transformasi tidak meninggalkan dimensi tradisional, khususnya adalah bagaimana penguasaan selama ini dilakukan oleh sistem ekonomi Feodalisme hingga Kapitalisme. Di wilayah perbatasan, Orang Sangir yang tinggal dekat dengan laut melakukan mobilisasi sebelum orang-orang Eropa datang, dan dimensi tradisional tersebut masih dilakukan, tetapi dibawah kuasa baru, yaitu negara modern. Mendasarkan diri pada isu transnasionalisme dan sekuritas, Indonesia dan Filipina membuat regulasi yang mengatur mobilitas migran. Pada akhirnya, Orang Sangir tersebut merasa selalu menjadi kriminal, disematkan stigma ilegal, tereksklusi dari kepulauannya sendiri di mana masyarakat yang tidak tinggal di Sangihe Besar mengklaim dirinya sebagai *Orang Pulo*. Kami melihat bahwa wilayah perbatasan Indonesia-Filipina sebagai wilayah abu-abu, cair, dan laboratorium kreatif.

Keywords: Marginal, Hubungan Relasional, Legal-Ilegal, Orang Sangir

DDC:

Nabilla Nailur Rohmah

**BERDAMPINGAN DENGAN LELUHUR DI MASA DEPAN: HISTORISITAS,
LANSKAP, DAN ARTIKULASI IDENTITAS MASYARAKAT TENGER SENDURO**

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 76–87

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji signifikasi historis ajaran leluhur dan lanskap Puncak Songolikur bagi masyarakat Tengger di Senduro dan bagaimana historisitas tersebut dimaknai, direpresentasikan, dan direkonstruksi dalam konteks sejarah masa kini. Dalam tulisan ini, cerita rakyat Tengger tentang “Joko Seger dan Roro Anteng” tidak dikaji sebagai legenda ataupun mitos, melainkan sebagai sejarah publik yang memiliki relevansi dengan realita sosial masa kini. Bagi orang Tengger, cerita mengenai asal-usul leluhurnya menyangkut keseluruhan kerangka teologis yang mendasari tatanan sosial dan praktik kultural dalam kehidupan kesehariaanya. Kebijakan Lima Agama Mayoritas rezim Orde Baru telah menyebabkan Hinduisasi dan Islamisasi besar-besaran, yang juga berpengaruh besar terhadap tatanan sosial dan kultural masyarakat Tengger. Terlebih lagi, penerapan kebijakan Taman Nasional dan Pariwisata di ruang hidup mereka telah melahirkan tantangan yang lebih besar, yang memanifestasikan tatanan kehidupan yang semakin kapitalistik dan profan. Dalam kondisi ini, Puncak Songolikur mengahadirkkan dan merawat narasi historis mengenai leluhur masyarakat Tengger di Senduro, sebagaimana pula merawat nilai-nilai spiritual, tatanan sosial, praktik budaya, dan keseluruhan cara hidup yang menyertainya. Namun, pengembangan destinasi wisata “Puncak B29” di lanskap Puncak Songolikur sejak 2013 menjadi tantangan sekaligus peluang bagi narasi sejarah masyarakat Tengger Senduro. Dalam tulisan ini akan ditunjukkan bagaimana pengembangan pariwisata dapat berpeluang menjaga sekaligus mengkontestasikan historisitas Puncak Songolikur. Pembahasan tersebut menyangkut bagaimana masyarakat Tengger di Senduro menegaskan, menegosiasikan, dan mengartikulasikan kembali identitasnya dalam konteks sejarah hari ini.

Kata kunci: Tengger Senduro, Puncak B29, Puncak Songolikur, Historisitas, Artikulasi

DDC:
Suroyo

RINGKASAN DISERTASI:
RITUAL BEDEKEH SUKU AKIT DI PULAU RUPAT
KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU PADA ERA GLOBAL

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 88–97

ABSTRAK

Ritual *bedekeh* sangat erat kaitannya dengan tradisi dan adat istiadat masyarakat suku Akit. Suku Akit menggunakan sistem pengetahuan, kepercayaan presepsi sebagai bagian dari kebudayaan dan tradisi mereka terhadap konsep sehat dan sakit serta penyebab sakit tersebut. Suku Akit dan masyarakat pendukungnya telah memiliki pengetahuan lokal (*local knowlegde*) dan kearifan lokal (*local wisdom*) dalam mengatasi masalah kesehatan dan cara mengobatinya apabila masyarakat mengalami gangguan kesehatan. Penelitian ini membahas tradisi ritual *bedekeh* suku Akit di Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Tradisi ini masih tetap dipraktikkan oleh masyarakat suku Akit, tetapi keberadaan sekarang semakin terpinggirkan oleh faktor intern dan ekstern. Pelaksanaan ritual *bedikie* banyak mengandung kearifan lokal, simbol, nilai, dan dampak bagi kehidupan masyarakat pendukungnya. Penelitian ritual *bedekeh* oleh *bomoh* pada suku Akit di Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dirancang sesuai dengan paradigma keilmuan kajian budaya (*cultural studies*). Sebagai landasan analisis, digunakan teori hegemoni, teori praktik, dan teori wacana relasi kuasa dan pengetahuan. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, studi pustaka, dan dokumentasi.

Berdasarkan telaah dan metode analisis pelaksanaan upacara ritual mempunyai tahap-tahap yang harus dilakukan sebagai berikut Pertama, pemeriksaan, yaitu pemeriksaan perlengkapan upacara ritual dipimpin oleh *Batin* dan *Bomoh* menentukan waktu untuk mengadakan ritual. Kedua, penyerahan, yaitu *Bomoh* menyerahkan peralatan dan bahan yang dibutuhkan dalam upacara pelaksanaan ritual. Ketiga, *tegak bomoh*, yaitu berlangsungnya upacara ritual pengobatan oleh *bomoh*. Faktor yang memengaruhi semakin terpinggirnya ritual *bedekeh* suku Akit di Desa Hutan Panjang, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau adalah relasi kuasa dalam konversi agama, stigma negatif bahwa orang Akit terkenal dengan ilmu sihir, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sistem pengobatan modern dan pengaruh pendidikan formal dan nonformal dalam berbagai jenjang dan cara berpikir manusia. Implikasi dari keterpinggiran ritual *bedekeh* adalah sikap terbuka suku Akit melalui kontak budaya (akulterasi) dengan kebudayaan lain, penyederhanaan praktik ritual oleh *bomoh* dalam dimensi waktu, dan semakin menguatnya identitas suku Akit. Upaya yang dilakukan sebagai langkah strategis pewarisan ritual *bedekeh* secara intern dan ekstern. Profesi *bomoh* dianggap sangat membantu dan masih dibutuhkan untuk pengobatan, pemerintah diharapkan memberikan bantuan kepada profesi *bomoh* dari segi pendanaan (tunjangan) agar lebih fokus terhadap profesi sebagai pengobat tradisional.

Kata kunci: *bedikie, bomoh, suku Akit, keterpinggiran, pewarisan*

DDC:
Puji Hastuti
TINJAUAN BUKU:
EKOLOGI MANUSIA DAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN

Prof. Oekan S. Abdoellah, Ph.D., PT Gramedia Pustaka Utama, 2017. 256 hlm.

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 98–102

DDC:

Muhammad Luthfi

TINJAUAN BUKU:

MELIHAT PERKEMBANGAN SAINS DI INDONESIA,

REVIEW BUKU *STS DI INDONESIA KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASINYA:*

QUO VADIS?

Soewarsono, Thung Ju Lan, & Dundin Zaenuddin. STS di Indonesia Kebijakan dan Implementasinya: Quo Vadis? PT Gading Inti Prima (Anggota IKAPI): 186 hlm, 16 x 21 cm.

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 103–118



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 44

NOMOR 2, DESEMBER 2019

DDC:

Katubi

TARA MITI TOMI NUKU: NURTURING TOLERANCE OF TRADITION IN ALOR, EAST NUSA TENGGARA

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 1–16

ABSTRACT

The increase of religious intolerance in Indonesia has recently become a serious problem in the construction of multicultural life. However, some areas in Indonesia are considered successful in maintaining tolerance, for instance, in the Province of East Nusa Tenggara, particularly in Alor-Pantar Island. When a great conflict in the context of religious issues occurred in parts of Eastern Indonesia after the collapse of the New Order, the Alor-Pantar local community could avoid this terrible conflict due to their solidarity. It is because people from each village in Alor-Pantar Island have developed means to avoid conflicts based on tradition, including conflicts in religious terms. Therefore, academics are encouraged to discuss about the religious life of the people in the Alor-Pantar Island and its relationship with customs. Different from prior writings, this article discusses the traditions of the Muslim and Christian communities in Alor in undergoing their lives through cultural values by giving special respect to a local tradition, *Tara miti Tomi nuku*, which means ‘brotherhood in diversity’. To disclose this issue, the oral tradition of *lego-lego* will be the center of discussion. This paper is based on field research using ethnographic methods. Based on the analysis of the implementation of the *lego-lego*’s oral tradition and the *lego-lego*’s lyrics, this paper describes two things, which are 1) socio-cultural practices that have been carried out by different religious groups in maintaining tolerance; 2) means that various ethnic groups in Alor have been undertaken to teach the importance of interfaith mutual respect through the oral tradition of *lego-lego*, especially through the lyrics of the song.

Keywords: *religious tolerance, tara miti tomi nuku, lego-lego, oral tradition, Alor, multiculturalism*

DDC:

Ahrie Sonta

ETHICAL CULTURE’S STRENGTHENING MODEL AT RESORT POLICE AS PART OF POLICE REFORM: A BOURDIEU’S HABITUS BASED APPROACH

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 17–35

ABSTRACT

This research emerged from concerns over cultural reform within the Indonesian Police, which has yet to show expected results, compared to successfully materialized structural and instrumental changes within the frame of Police Reform in the past two decades. Ethical culture, in this research, is believed as ‘organizational capital’ that is needed by the Police to facilitate cultural change. Inquiry into police *habitus* at the Sidoarjo Resort Police as this research’s object, revealed some problems hindering institutional integrity, i.e.: reminders of paramilitary culture, police *doxa* as crime-fighter, insufficient and partial development of internal oversight system, absence

of public participatory ethical infrastructure, and deonthologic or rule-based definition of ethical approach. In the time being, on personnel integrity aspect, there found the following problems: limited comprehension of ethics as a philosophy and of public ethics as public official's code of conduct, absence of training on ethics in police education, absence of supporting symbolic capitals, and weaknesses within recruitment and socialization system for newly recruited officers. A model of ethical culture strengthening is thus developed to overcome the problems on institutional and personnel integrity, particularly at the resort level police organization.

Keywords: *Public Ethics, Ethical Culture, Sidoarjo City Resort Police, Structure-Agent*

DDC:

Abd. Rahman

COLONIAL HERITAGE AND MARGINALIZATION OF THE LOLODA PEOPLE ON THE WEST COAST OF HALMAHERA

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 36–47

ABSTRACT

This paper aims to briefly discuss the marginalized situation of the Loloda people on the west coast of Halmahera in all development sectors compared to other regions in North Maluku. Discussing North Maluku, it is not complete without talking about Loloda as an integral part of the Moluccas' world. Contemporary information states that Loloda is the oldest kingdom of Moluccas (Moloku Loloda) on the northwest coast of Halmahera, the Molucca Sea Region and Islands. Loloda is the main part of the history and culture of the "Moluccan world" since its foundation in the 13th Century. Attempts to maintain and preserve customs and traditions of the Kingdom of Loloda are still ongoing until today, although since the Old Order period (1950–1969), all regions in Indonesia dominated by the Kingdom and Sultanate systems were abolished. Those regions are integrated into the nomenclature of the regional administration system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. This integration is the realization of restructuring the Republic of Indonesia to the new and official form for more than two decades of independence. The question is whether or not the hegemonic power of Ternate as the Dutch East Indies' colonial heritage of Loloda remains in existence, so the former area of the oldest kingdom of Moluccas is still marginalized from regional and national development. This article utilizes historical methods and methodologies throughout a study of literature, archives, and field observations, as well as interviews with selected resource persons.

Keywords: *Loloda, Halmahera, Heritage, Colonial, Marginalization*

DDC:

Ganesh Cintika Putri

ART FOR PEACE: GRASSROOTS' RECONCILIATION EFFORTS AFTER THE 1965 TRAGEDY

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 48–59

ABSTRACT

Mass killings and enforced disappearances which occurred after the 1965 tragedy have been becoming a prolonged conflict until today. The historical narrative shaped by the government puts a group of people who were allegedly involved in the Communist Party of Indonesia (PKI) experiencing stigmatization and injustice for up to 40 years. This paper intends to analyze the strategies undertaken by grassroots communities to create alternative narratives as a part of the reconciliation efforts. Particularly, this paper will examine the alternative historical narratives presented in the Gejolak Makam Keramat Theatrical Performance on July 13, 2017, in Yogyakarta. This performance was chosen due to the arts of scripts making, practices, choices of speaking methods, and the involvement of audiences which were able to narrate alternative history amidst the dominance of narratives that hindered the reconciliation attempts. This paper would like to say that the Gejolak Makam Keramat Theatrical Performance has contributed a space to historical narratives as a part of grassroots reconciliation efforts. There are, at least, three strategies implemented to achieve those objectives, which are: the packaging of alternative narratives in an art object which is safer than persecution; the participation of survivors as the subject of the narrative, and; the involvement of audiences in the process of presenting the narration.

Keywords: *art, theater, reconciliation, alternative narratives*

DDC:**Dhimas Langgeng Gumilar, Natasha Devanand Dhanwani****MARGINALIZATION LEVELS AND ILLEGAL CONSTRUCTION IN BORDER COMMUNITIES ON THE INDONESIA-THE PHILIPPINES BORDER**

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 60–75

ABSTRACT

Marginal studies often focus on the identity of a local community which unconsciously construct an anachronistic marginal dimension. That study also plunged the people of the Indonesia-the Philippines border and showed up romanticism. The research was conducted on Sangihe Islands, based on ethnographic and historical facts and observations undertaken in July-August, 2018. We use relational relations to capture the plot of transformation in European records and historical studies that have been published. The relationship describes a group of fighters which consisted of forced laborers who became slaves. Transformation cannot be disengaged from the traditional dimension, particularly on how control has been ruled out by the dominance of the economic system of Feudalism to Capitalism. In the border area, the Sangir people, who resided nearby the sea, mobilized before the Europeans arrived. The traditional dimension was still carried out, but under the new authority, which is the modern state. Based on the issues of transnationalism and security, Indonesia and the Philippines made a regulation that regulated the mobility of migrants. The Sangir people, eventually, found themselves as criminals, which were identic with illegal stigma, and were excluded from their own islands where people who did not live in Sangihe Besar claimed themselves as *Orang Pulo*. We perceive the Indonesia-the Philippines border as a gray, liquid, and creative laboratory area.

Keywords: Marginal, Relational Relations, Legal-Illegal, Sangir People

DDC:**Nabilla Nailur Rohmah****SIDE BY SIDE WITH ANCESTORS IN THE FUTURE: HISTORICAL, LANDSCAPE, AND ARTICULATION OF THE IDENTITY OF THE TENGGER SENDURO PEOPLE**

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 76–87

ABSTRACT

This article studies the historical significance of the ancestral tenet and the landscape of Puncak Songolikur for Tengger people in Senduro and how they are being performed, represented, and reconstructed in the present historical context. In this paper, the Folklore of Tengger about “Joko Seger and Roro Anteng” is studied neither as legend nor myth, but as public history which has relevance to the present social realities. For them, the story of the origin of their ancestor encompasses the overall theological framework that underlies the social order and cultural practices in their everyday life. The five religions policy during the authoritarian New Order regime has led to a massive Hinduization and Islamization which has a great influence on the social and cultural order of Tengger people. Moreover, the enforcement of national park and tourism policy in their living space has raised greater challenge which manifests an increasingly capitalistic and profane life order. Under this condition, Puncak Songolikur presents and preserves the historical narrative about their ancestors as well as spiritual values, social order, cultural practice, and life. However, the development of tourist destination “Puncak B29” in the landscape of Puncak Songolikur since 2013 has become both a challenge and opportunity for their historical narratives. This paper explores how tourism development maintains and simultaneously contests the historicity of Puncak Songolikur. It includes how people assert, negotiate, and rearticulate their identity in current cosmopolite historical horizon.

Keywords: Tengger Senduro, Puncak B29, Puncak Songolikur; Historicity, Articulation

DDC:

Suroyo

DISSERTATION SUMMARY: THE BEDEKEH RITUAL OF THE AKIT PEOPLE IN RUPAT ISLAND, BENGKALIS REGENCY, RIAU PROVINCE, IN THE GLOBAL ERA

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 88–97

ABSTRACT

The *bedekeh* ritual is closely linked to the customs and traditions of the Akit people. The Akit people use the system of knowledge in which the belief in perception as a part of their culture and tradition towards health and sick concepts as well as the causes of diseases. The Akit people and their relatives utilize local knowledge and local wisdom in overcoming health problems as well as a means to cure the diseases. This research discusses the ritual tradition of *bedekeh* traditionally held by the Akit people in Rupat Island, Bengkalis Regency, Riau Province. The Akit people remain practicing this tradition, but its existence is now slowly marginalized by internal and external factors. *Bedekeh rituals* encompass a lot of local wisdom, symbols, values, and impacts for the lives of the Akit People. Research on *bedekeh rituals* by the *bomoh* of the Akit people in Rupat Island, Bangkalis Regency, Riau Province was designed based on the scientific paradigm of cultural studies. As an analysis framework, hegemony, practical, and power and knowledge relations theories are used to sharpen the research result. The data collection was undertaken through observations, in-depth interviews, a study of literature, and documentation.

Based on research and analysis methods, the implementation of rituals has several steps to be done. First, an investigation in which the inspection of ritual equipment is done and led by *Batin*, and *Bomoh* determines the time to hold the rituals. Secondly, a handover in which *Bomoh* gives the necessary equipment and materials for the implementation of rituals. Thirdly, *tegak bomoh* in which *bomoh* conducts the rituals for treating sick people. Some factors affecting the marginalized condition of *bedekeh* rituals of the Akit people in Hutan Panjang Village, Rupat District, Bengkalis Regency, Riau Province are power relations in religious conversion. It is seen that there is a negative perspective towards the Akit People who are famous for witchcraft, the development of science and technology in the modern medical system, and the influence of formal and non-formal education on various levels and the changing of ways of thinking in human beings. The impacts of the marginalized condition of *bedekeh* ritual are: the Akit people are more open in which cultural contacts (acculturation) occurred with other cultures, the ritual practices are simplified by *bomoh*, and the identity of the Akit people is getting stronger. These attempts are done as strategic steps to inherit *bedekeh* rituals internally and externally. *Bomoh* is considered very helpful and is still necessary for medication. The government is expected to provide assistance to *bomoh* in the context of funding (allowances) in order to be more focus on their job as a traditional healer.

Keywords: *bedikie, bomoh, Akit, marginalization, inheritance*

DDC:

Puji Hastuti

TINJAUAN BUKU: EKOLOGI MANUSIA DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Prof. Oekan S. Abdoellah, Ph.D., PT Gramedia Pustaka Utama, 2017. 256 hlm.

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 98–102

DDC:

Muhammad Luthfi

TINJAUAN BUKU: MELIHAT PERKEMBANGAN SAINS DI INDONESIA, REVIEW BUKU STS DI INDONESIA KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASINYA: QUO VADIS?

Soewarsono, Thung Ju Lan, & Dundin Zaenuddin. STS di Indonesia Kebijakan dan Implementasinya: Quo Vadis? PT Gading Inti Prima (Anggota IKAPI): 186 hlm, 16 x 21 cm.

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 103–118

TINJAUAN BUKU:

EKOLOGI MANUSIA DAN PEMBANGUNAN

BERKELANJUTAN

Prof. Oekan S. Abdoellah, Ph.D., PT Gramedia Pustaka Utama, 2017. 256 hlm.

Puji Hastuti

*Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
pujisht@gmail.com*

PENDAHULUAN

Buku yang berjudul *Ekologi Manusia dan Pembangunan Berkelanjutan* yang ditulis oleh Oekan S. Abdoellah bermaksud mengetengahkan pembangunan berkelanjutan dari perspektif ekologis. Hal ini menjadi persoalan serius mengenai interaksi manusia dengan alam dalam membangun lingkungan hidup yang berkelanjutan. Selama ini, dalam pandangan ekologi, manusia aktor yang memiliki kuasa penuh terhadap alam. Dipandang sebagai penguasa alam, tak ayal manusia poggah menghisap nilai komoditasnya untuk kepentingan ekonomi semata. Alam menjadi rusak karena pembangunan yang terus-menerus dengan imajinasi keuntungan ekonomi yang dapat memakmurkan umat manusia.

Kondisi eksploitasi alam ini menyebabkan timbulnya permasalahan lingkungan, bumi dimana manusia hidup menjadi terancam. Kondisi ini kemudian sampai pada relasi yang dipaparkan dalam buku ini yaitu hubungan kausalitas ini, Julian H. Steward (1936) memberikan perhatian kepada manusia sebagai bagian dari ekosistem dimana manusia itu hidup yang saling memiliki pengaruh antara manusia dengan lingkungannya, baik biotik maupun abiotik. Dalam kondisi ini, perubahan kebudayaan ialah yang ditutut dan digadang-gadang harus mampu mendukung pembangunan harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan kelanggengan sumber daya.

Sejalan dengan hal tersebut, buku ini memperkuat paradigma baru dalam pembangunan yaitu dimungkinkannya ekspansi pembangunan secara berkelanjutan dari pespektif ekologis. Pembangunan tidak lagi dilakukan secara pong-

gah dan membabi-buta tanpa mengindahkan kaidah-kaidah ekologis. Tidak serta-merta mengejar keuntungan ekonomi semata sebab justru kerugian yang ditimbulkan terhadap rusaknya lingkungan akan lebih membawa petaka besar.

Contoh-contoh yang disajikan begitu dekat dengan isu-isu di Indonesia. Isu yang dibahas dalam buku ini sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk mendukung kesepakatan global pembangunan berkelanjutan dalam kerangka SDG's (Sustainable Development Goals). Menurut SDGS, pilar utama bagi pembangunan berkelanjutan adalah manusia, bumi, kemakmuran, perdamaian, dan solidaritas global. Pembangunan berkelanjutan dapat terwujud apabila berbagai berbagai aspek dapat bermitra secara harmonis, utamanya antara manusia dan bumi tempat manusia tinggal untuk menciptakan kemakmuran dan perdamaian yang dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan berlandaskan kaidah ekologis, mutlak dilakukan di segala bidang terkait secara sinergis.

Oleh karena itu, melalui kekuatan regulasi, peran pemerintah menjadi penting untuk menciptakan sinergi berkesinambungan disegala bidang. Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, presiden mengeluarkan regulasi untuk mengawal pembangunan berkelanjutan melalui Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017. Regulasi ini bertugas untuk memastikan pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia semata-mata untuk kesejahteraan umat manusia yang dilakukan tanpa tindakan merusak lingkungan yang ada.

Namun pada pelaksanaannya kembali lagi kepada persoalan perilaku dan kebudayaan masyarakat yang kini menjadi jauh dan terlepas dari keterkaitan dengan lingkungan.

Buku Oekan S. Abdoellah terdiri atas dua bagian utama. Pada bagian pertama buku ini, penulis ingin memberikan pemahaman dasar ekologi manusia sebagai bagian dari cabang ilmu pengetahuan. Maka, pada bab satu dibahas mengenai landasan filosofis dari ekologi manusia. Secara ontologis, ekologi manusia membahas hubungan manusia dan alam sebagai sebuah kesatuan. Pandangan ini meyakini bahwa manusia tidak mungkin dapat hidup tanpa keterpautannya dengan alam. Sehingga, ekologi manusia secara ontologis menegaskan pandangan dualisme Cartesian yang menempatkan alam dan kehidupan manusia sebagai dua entitas terpisah. Sebagaimana yang telah dibahas oleh banyak ilmuan, pandangan dualisme ini membawa malapetaka terhadap kondisi lingkungan. Hal ini ditenggarai oleh pesatnya kemajuan teknologi yang menempatkan manusia pada posisi penguasa alam. Oleh karenanya, manusia dipandang sebagai aktor utama pelaku kerusakan lingkungan yang masif dan tidak terkendali.

Penulis berpendapat untuk dapat menelisik persoalan interaksi manusia dengan alam secara holistik, mustahil untuk memisahkan aspek sosial dari lingkungan fisik. Keterpautan keduanya menjadi penting untuk dipahami sampai pada tataran teoritis dan konseptual. Sehingga pada bab dua, penulis menyajikan konsep kunci untuk memahami interaksi yang terjadi antara sosial budaya dan biofisik. Adapun konsep yang dibahas ialah ekosistem, arus energy dalam ekosistem manusia, materi dan ekosistem, arus informasi dalam ekosistem manusia, adaptasi, evolusi, habitat dan relung ekologis (*nische*) dan daya dukung lingkungan.

PENGETAHUAN DASAR ILMU EKOLOGI MANUSIA

Bagian awal buku ini, pembaca dituntun untuk memahami disiplin ekologi manusia dalam tataran konseptuan teoritis. Secara filosofis, dasar ekologi manusia bertumpu pada pandangan ontologis yang menyatakan bahwa manusia dan lingkungan

bukanlah dua entitas yang terpisahkan. Ekologi manusia satu disiplin yang mengembangkan perpaduan antara ilmu sosial dan ilmu alam. Oleh karenanya, konsep dan teori yang berkembang dalam ekologi manusia merentang beragam tradisi ilmu sosial maupun ilmu alam terutama ekologi dan biologi.

Konsep-konsep pokok yang disajikan penulis merupakan pilar untuk memahami analisis persoalan ekologi manusia. Ekosistem dipahami sebagai sistem yang terikat secara geografis yang dibentuk atas unsur energi, materi, dan arus informasi. Selain ekosistem dengan unsur-unsur dinamis, konsep penting lain dalam ekologi manusia ialah adaptasi yang dipahami sebagai penyesuaian diri manusia terhadap lingkungannya. Dalam sistem ekologi, proses adaptasi dan evolusi bersamaan sering kali terjadi. Adaptasi bersama atau proses adaptasi parallel terjadi antara sistem sosial dengan ekosistem sedangkan evolusi bersama merupakan proses evolusi yang menjalankan sistem sosial dan ekosistem secara bersamaan.

Konsep habitat dan relung ekologis (*nische*) menjadi pilar penting dalam menyelami ilmu ekologi manusia. Konsep relung berguna untuk memberikan mekanisme adaptif terhadap praktik spesies khas. Sedangkan habitat diartikan sebagai tempat hidup spesies tertentu atau suatu tempat di bumi dengan cara pemenuhan yang khas. Selanjutnya, konsep daya dukung lingkungan mempunyai definisi kemampuan ruang ekologis dalam menunjang kemampuan optimum dalam periode tertentu. Dari kacamata populasi, daya dukung lingkungan diartikan sebagai seberapa banyak materi, energi, dan informasi yang bisa dihasilkan atau digali dari suatu ruang hidup tertentu bagi keberlangsungan hidup populasi dalam konteks reproduksi dan perkembangannya.

Penulis mengulas beberapa teori dan pendekatan yang secara historis dominan dalam ekologi manusia. Ada dua pemikiran yang melatarbelakangi ontologi hubungan ekologi manusia yaitu determinisme lingkungan (*environmental determinism*) dan kemeretakan lingkungan (*environmental possibilism*). Kedua aliran pemikiran ini lebih dahulu dibahas oleh penulis karena dianggap sebagai peletak dasar

teori dan pendekatan yang tengah berkembang dalam konteks sejarah pemikiran ekologi manusia. Dalam disiplin ekologi manusia, banyak ahli yang tidak puas terhadap jawaban umum yang diberikan oleh teori determinasi dan kemeretakan lingkungan. Sehingga ini yang mendorong lahirnya teori ekologi budaya oleh Julian Steward (1955). Selanjutnya, perkembangan paling akhir dalam teori ekologi manusia ialah menyebarluasnya ekologi politik sebagai sebuah pendekatan. Teori ekologi politik merupakan kombinasi pendekatan ekologi budaya ala Steward dan teori ekonomi politik.

PENERAPAN ANALISIS EKOLOGI MANUSIA DALAM KASUS

Penulis menyajikan lima kasus mengenai dampak perubahan lingkungan yang dialami oleh masyarakat di beberapa daerah. Beragakat dari pemahaman konseptual dan teoritis yang telah diperkenalkan oleh penulis pada bagian awal buku, pada bagian ini pembaca diajak untuk praktik langsung menggunakan kacamata analisis ekologis dalam memahami persoalan yang disajikan. Melalui persoalan kerusakan lingkungan yang disajikan dalam kasus di lima tempat berbeda, pembaca mendapatkan keterpautan persoalan ekologis yang bersumber pada perubahan sosial ekonomi akibat permintaan pasar, regulasi penyeragaman lanskap, dan adaptasi manusia.

Pada kasus pertama, perubahan ekosistem pekarangan di Hulu DAS Citarum berorientasi pasar berpotensi menurunkan keberlanjutan secara ekologi maupun sosial. Keanekaragaman hayati pada pekarangan warga mengalami perubahan kepada tanaman monokultur untuk memenuhi kebutuhan pasar. Kondisi ekologis mendukung desa Tineliti, di Hulu DAS Citarum untuk melakukan budidaya tanaman komersil seperti kubis, daun bawang, dan berbagai kebutuhan sayur manyur lainnya untuk pasokan kota besar. Selain mengancam keanekaragaman hayati, aktivitas dari pekarangan komersil juga mengancam kerusakan lingkungan melalui penggunaan pestisida berlebihan. Tidak hanya itu, ancaman ikatan sosial timbul akibat aktivitas pembangunan pagar pekarangan oleh masyarakat terhadap “pekarangan komersil”. Padahal

sebelumnya, pekarangan memiliki fungsi sebagai arena sosial yang egaliter, kini harus dipagari oleh ancaman perampasan komoditas ekonomi.

Pada kasus selanjutnya, penulis mengetengahkan potensi sistem agroforests tradisional seperti budi daya pekarangan dan kasus kebun talun untuk mengatasi ancaman degradasi lingkungan. Keberadaan pekarangan dan kebun talun di Jawa Barat memiliki manfaat ekologis pengurangan efek rumah kaca karena CO₂ dapat terserap dengan baik. Tidak hanya manfaat ekologis, sistem agroforests di pedesaan Jawa Barat juga menjadi simbol pengikat sosial penduduk sebab hasil buah-buahan dan tanaman lainnya dapat dinikmati bersama oleh masyarakat. Namun, sistem agroforests tradisional terancam diubah oleh penduduk menjadi lahan komersil yang mengancam keanekaragaman spesies. Kondisi yang tidak menguntungkan secara ekologis ini coba diselesaikan oleh penulis dengan konsep revitalisasi sistem agroforests tradisional. Melalui berbagai skema pengolahan lahan, konsep revitalisasi harus mampu menjamin keberlangsungan penduduk dalam tiga aspek yaitu ekologi, ekonomi, dan sosial.

Studi kasus selanjutnya, di DAS Citarum Jawa Barat menampilkan pendekatan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai unit analisis untuk memahami permasalahan degradasi lingkungan. Permasalahan berlapis dialami oleh DAS Citarum, mulai dari pertumbuhan penduduk, kemiskinan, pengembangan teknologi yang tidak ramah lingkungan, dan penetrasi ekonomi dalam pasar global. Melalui konsep DAS, permasalahan saling-silang ini dapat digambarkan dalam interaksi manusia dengan lingkungannya yang jelas batasannya.

Kasus selanjutnya menampilkan persoalan adaptasi transmigran pada lahan pasang surut di Kalimantan Selatan. Bagi William A. Haviland (1999), definisi adaptasi bertumpu pada hubungan timbal balik antara perubahan yang ditimbulkan oleh manusia pada lingkungannya. Untuk mencapai kondisi adaptif, dibutuhkan strategi bertahan hidup transmigran pada lingkungan baru melibatkan aspek budaya asal mereka. Menurut Sponsel (1986), manusia senantiasa kembali ke asal budayanya saat menyesuaikan

diri dengan lingkungannya. Walaupun budaya memiliki pengaruh penting dalam proses adaptasi, pengaruh dinamis faktor biofisik seperti pH tanah, defisiensi unsur hara, dan hidrologi membatasi strategi oleh transmigran.

Studi kasus terakhir menampilkan adaptasi penduduk terdampak proyek pembangunan PLTA Cirata di Jawa Barat. Di pemukiman baru, penduduk bergulat menghadapi perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ditopang oleh sistem budaya di tempat asal, penduduk melakukan adaptasi terhadap berbagai aspek perubahan yang dialami. Melalui serangkaian daya upaya yang kemudian ditranslasikan sebagai perilaku yang mengarah pada seberapa kuat adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat. Walaupun demikian, dikatakan oleh Johnson (1982), kebudayaan bukan satu satunya sistem yang adaptif, diperlukan pendekatan terintegrasi untuk melihat hubungan dinamis antara alam dan budaya secara holistik.

Perubahan gaya hidup modern dan eksplorasi korporasi telah membuat perubahan kultur masyarakat dalam memperlakukan ruang ekologinya. Transmisi kaidah adat menjadi usang sebagai proteksi sosial sebab generasi masa kini tidak mampu merelasikan diri dengan lingkungannya. Kepedulian dan kepekaan terhadap ruang ekologi yang ditinggali terbelenggu kultur industrialisasi. Dalam konteks masyarakat industrial seperti sekarang ini, daya lenteng lingkungan menghadapi eksplorasi melampaui kapasitas lingkungan memperbarui diri. Kondisi ini menyisakan bagian alam yang rusak secara ekologis, artinya alam tidak bisa menyimpan dan meneruskan kembali simpanan daya dan energinya dalam konteks waktu. Pendekatan restorasi ekologi merupakan bagian dari upaya untuk memulihkan alam yang telah rusak akibat aktivitas manusia pada era industrialisasi. Seyogyanya, kita bersama bisa melakukan pemulihan kondisi lingkungan dengan melakukan restorasi lingkungan untuk memulihkan bentang alam yang telah terombak kultur pembangunan industrialisasi. Agenda pemulihan bisa dilakukan dengan membuat kaidah pengelolaan lingkungan yang menyeimbangkan kebutuhan masyarakat dan kelestarian alam.

Pengelolaan lingkungan harus dijaga agar tidak terjadi ketimpangan antara eksplorasi dan daya pembaharuan dirinya sebagai ekosistem. Kaidah pengelolaan kelestarian lingkungan ini hendaknya menjadi kultur komunitas yang diresapi dan dipatuhi oleh seluruh pranata termasuk diantaranya masyarakat, aparat negara, dan korporat.

KESIMPULAN

Pembangunan berwawasan ekologis menjadi kaidah esensial yang harus dilakukan untuk keberlanjutan lingkungan sebagai tempat tinggal manusia. Indonesia melalui SDGS didukung oleh Peraturan Presiden (Perpres) No. 59/2017 merupakan regulasi bagi penyelamatan lingkungan yang seyogyanya memiliki andil besar untuk itu. Aturan ini harus diturunkan dalam berbagai kebijakan nyata agar pembangunan Indonesia yang berwawasan ekologis tidak hanya menjadi citra belaka dan cita-cita semu.

Segala kebijakan pembangunan semestinya harus berpedoman pada pelindungan bumi terhadap penurunan kualitas dan dapat mendukung kebutuhan generasi sekarang maupun generasi mendatang. Oleh karena itu, upaya ini harus didukung secara optimal oleh segenap pihak baik pemerintah, organisasi penggiat pelestarian alam, dan yang terpenting ialah masyarakat umum untuk mengelola sumber daya alam secara berkesinambungan.

Melalui buku ini, Prof. Oekan S. Abdoellah, Ph.D, memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuannya terhadap pentingnya “gaya baru hidup yang ekologis”. Lingkungan sangat penting bagi kehidupan manusia karena didalamnya lingkungan itu terdapat mahluk hidup maupun benda mati yang saling bergantung. Dalam melihat permasalahan pembangunan, cara pikir kedua hal ini tidak dapat diabaikan. Jika lingkungan hidup tidak terpelihara maka akan menyebabkan bencana bagi penghuninya. Manusia selalu memanfaatkan sumber daya alam lingkungan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang identik dengan istilah pembangunan. Pembangunan yang terus berjalan selalu memanfaatkan lingkungan baik langsung maupun tidak langsung. Meskipun perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi dapat mengatasi

batas hambatan yang ditimbulkan alam, tetapi kenyataannya masalah dan kerusakan lingkungan sulit dihindari sehingga mengganggu dan mengancam keberadaan manusia dan habitat penghuninya.

Buku ini merupakan pengantar yang baik untuk menyelami keseruan khazanah ilmu ekologi manusia. Contoh kasus yang disajikan oleh penulis membuat pembaca dapat mudah mengerti analisis ekologi manusia membuat pembaca dapat langsung memahaminya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Sayangnya, buku ini memang tidak dimaksudkan sebagai spesifik bagi pembaca yang ingin memahami ekologi manusia secara mendalam. Seperti memang yang sudah disingguh oleh penulis pada bagian pertama pendahuluan, buku ini hanya menjadi bahan bacaan awal terhadap penelusuran yang perlu dilakukan oleh pembaca sekalian yang memiliki minat untuk mengkaji ekologi. Aspek permasalahan ekologis yang kurang mendalam pembahasannya dalam buku ini, seperti ‘konsepsi bencana modern’. Padahal

apabila dielaborasi kembali, akan lebih menarik dan lekat dengan isu-isu lingkungan yang saat ini diperbincangkan. Sayangnya, memang penulis pun sudah membatasi bahwa buku ini hanyalah dapat menjadi pemantik pembaca awam untuk menggali isu-isu ekologi.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdoellah, O. (2017). *Ekologi Manusia dan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Arifin, Z. (1998). Hubungan Manusia dan Lingkungan dalam Kajian Antropologi Ekologi. *Jurnal Antropologi*.
- Boedhisantoso, S. (n.d.). Keterbatasan Lingkungan dan Keberingasan Sosial. *Antropologi Indonesia* 13/59, 20-32.
- Haviland, W. A. (1985). *Antropologi*. Jakarta: Erlangga.
- Steward, J. (1936). *The Economic and Social Primitive Bands*.
- Peraturan Presiden (Perpres) No. 59/2017

**STT
NO.1052/SK/DITJEN/PPG/STT/1986**

ISSN 977-0125-9989-1-9



LIPI Press